

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Elita Niswatun Afifah

19212013

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Elita Niswatun Afifah

19212013

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SLEMAN**



Disusun Oleh :

Nama : Elita Niswatun Afifah
NIM : 19212013
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh:



Dosen Pembimbing

**(Chivalrind Ghanevi Ayuntari S.E.,
M.Acc., Ak., CA)**

Dosen Penguji

(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)

Commerpart

(Dian Arisanti, SE, M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elita Niswatun Afifah

NIM : 19212013

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak adanya penjiplakan dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya sanggup menanggung segala konsekuensi nya sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 April 2022

Penulis



(Elita Niswatun Afifah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Diploma dengan judul **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN”**

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan tugas akhir ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menulis Tugas Akhir ini baik secara moral maupun materiil :

1. Ibu Marfuah, SE., M.Si, Ak. CA. selaku Kaprodi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari. SE., M.Acc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Tugas Akhir selesai dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang penuh kesabaran memberikan seluruh ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Diploma III Akuntansi angkatan 2019 yang baik hati dan yang sama-sama berjuang untuk lulus.
6. Bapak dan/atau Ibu serta Staf Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang telah menerima saya dengan baik serta memberikan kemudahan dalam penelitian dan pengambilan data Tugas Akhir.
7. Kedua Orang Tua, Bapak Wagiran, Mama (Almh) Suranti dan Ibu Kristinai yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, memberikan support yang luar biasa.
8. Calon pendamping hidup saya, Erdi Joko Sulisty S. yang selalu menjadi pendengar dan keluh kesah selama menyelesaikan laporan Tugas Akhir dan selalu yang mau direpotkan.
9. Terimakasih kepada seluruh teman, sahabat dan kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Harapan penulis semoga laporan tugas akhir ini dapat membantu menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca maupun

bagi dunia pendidikan yang membutuhkan. Namun terlepas dari itu, penulis memahami bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya laporan tugas akhir selanjutnya yang lebih baik.

Yogyakarta, 19 April 2022

Penulis



Elita Niswtaun Afifah

19212013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Bidang Magang	6
1.6 Lokasi Magang.....	6
1.7 Jadwal Magang	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1 Dasar-dasar Perpajakan.....	9
2.2 Pajak Penghasilan	14
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang Dibiayai APBN/APBD	27
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	31
3.1 Data Umum.....	31
3.2 Data Khusus	43
3.2.1 Perhitungan dan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.....	43
3.2.2 Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dengan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	8
Tabel 2 1 Tarif Pajak Penghasilan.....	18
Tabel 3.1 Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	45
Tabel 3.2 Daftar Kesalahan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang .	47
Tabel 3.3 Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.....	50
Tabel 3.4 Daftar Kesesuaian Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang	52
Tabel 3.5 Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.....	53
Tabel 3.6 Daftar Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang....	54
Tabel 3.7 Perbandingan Peraturan/Teori dengan Praktik di Lapangan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.....	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang	64
Lampiran 2 : Wawancara Penelitian	65
Lampiran 3 : Cetaklan <i>e-billing</i> PPh Pasal 22	67
Lampiran 4 : Cetaklan Bukti Potong PPh Pasal 22.....	68
Lampiran 5 : Bukti Pembayaran PPh Pasal 22	69
Lampiran 6 : Invoice Pembelian Barang.....	70
Lampiran 7 : Rekening Pemindahbukuan Pembelian Barang.....	71
Lampiran 8 : Pemungutan PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022	72
Lampiran 9 : Penyetoran PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022.....	84
Lampiran 10 : Pelaporan PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022.....	97

ABSTRAK

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Oleh :

Elita Niswatun Afifah (19212013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan di Instansi Pemerintah.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan) dan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah biaya yang dibebankan atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan dikenai tarif 1,5% dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman terkait dengan Perhitungan PPh Pasal 22 dengan dikenai tarif 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena nominal dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) masih dibebani pajak PPh Pasal 22 yang seharusnya tidak dikenai. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan pada hari disaat pembayaran atau 1 (satu) hari setelah pembayaran sehingga penyetorannya telah sesuai dengan peraturan. Pelaporan PPh Pasal 22 belum pernah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman karena masih dalam tahap sosialisasi terkait perpajakan, sehingga pelaporannya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22, Pembelian Barang, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap tahunnya Indonesia berupaya agar terus dapat memaksimalkan *income* negara dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai kegiatan yang berlangsung terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Samsudin, Elim, & Mintalangi S.E, 2021).

Dalam membiayai pembangunan nasional tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan dana guna menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dana tersebut diperoleh pemerintah Indonesia dari penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Sektor pajak merupakan sumber *income* negara paling tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Nasir, 2019).

Sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendapatan negara (*budgetair*) telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 2.540,4 triliun, sedangkan kontribusi dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,7 triliun. Dapat diartikan

bahwa 87,9% APBN sebagian besarnya ditopang dari penerimaan pajak (Mustika, 2022)

Pajak sebagai pemberi kontribusi paling tinggi atas penerimaan negara, hal itu dapat terlihat dari kinerja pelaksanaan APBN yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.003,1 triliun, melebihi target yang diputuskan dalam APBN tahun 2021 yaitu 114,9% dari tujuan atau meningkat 21,6% disandingkan dengan realisasi tahun 2020. Sedangkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,5 triliun yaitu 107,1% dari target APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa:

“Jadi seandainya sekarang *income* negara mencapai Rp 2.003,1 triliun kita akan menjadi 21,6% lebih tinggi dari APBN kita yang sebesar Rp 1.743,6 triliun, namun ini merupakan pemulihan dan kebangkitan yang luar biasa. Kompresi 16% tahun lalu terpukul keras oleh pandemic, tahun ini masih ada pandemic yang benar-benar serius menghantam yaitu delta dan omicron, namun kita tetap bisa berkembang pada di 21,6% itu untuk memberikan sudut pandang”.

Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya penerimaan pajak yang terjadi (Rahayu P. , 2022).

Saat ini, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk tertib membayar pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, salah satu pajak yang diterapkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan atau disingkat PPh. Pajak Penghasilan yang berlaku diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29 yang pajak pelunasannya ditarik oleh pihak luar. (Sorongan, 2014).

Direktorat Jendral Perbendaharaan sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pembiayaan dari APBN/APBD. Instansi di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Objek pemungutan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan tariff 1,5% dari harga pembelian yang dikecualikan dari PPN (Wae, Sabijono, & Lambey, 2019).

Kabupaten Sleman berhak, berwenang dan berkomitmen untuk mengendalikan seluruh urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya untuk bisa lebih mengembangkan organisasinya dalam melayani masyarakat daerah dan maksimal dalam melaksanakan perbaikan pembangunan sesuai dengan perintah otonomi. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman adalah salah satu dari instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 kepada wajib pajak penjual barang atas pembelian barang. Pembelian barang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dan menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan.

Pada praktiknya perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sering terjadi kesalahan sehingga dalam melakukan perhitungan harus sesuai dengan pajak yang semestinya. Dengan melakukan cara perhitungan yang benar maka tidak akan ada biaya yang lebih bayar atau kurang bayar. Sehingga bendahara pengeluaran harus lebih teliti dan diperlukan pemahaman yang baik mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 selaras dengan peraturan perpajakan yang berjalan, tidak terkecuali pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Sebagai pemungut pajak, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang secara konsisten setiap bulan atau pada masa pajak tersebut (Winata, Tinangon, & Afandi, 2022).

Berdasarkan dasar pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis menentukan rumusan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ?
2. Apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun target atas pelaksanaan magang yang ingin dicapai dalam tugas akhir yang penulis angkat adalah:

1. Mengetahui perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Menteri Keuangan 59/PMK.03/2022.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak instansi

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan saran-saran yang diperoleh sehubungan dengan penelitian terhadap perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

2. Bagi pembaca

Sebagai salah satu bahan masukan dan perbandingan bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan mengenai perhitungan, pemungutan,

penyetoran, pelaporan dan penerapan Pajak Penghasilan Pajak 22 pada Instansi Pemerintah.

3. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan untuk mengetahui dan menambah pengalaman mengenai penulisannya tentang perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

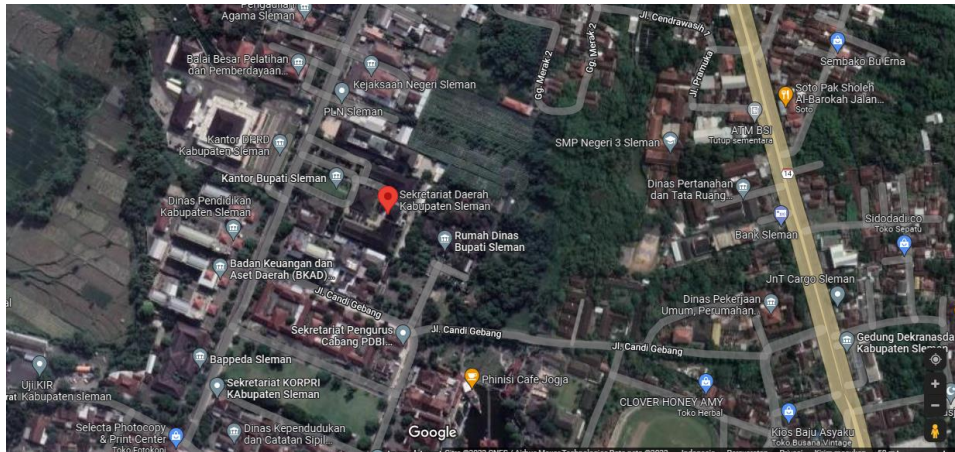
1.5 Bidang Magang

Penulis ditempatkan pada bagian Asisten Administrasi Umum di Bagian Umum tepatnya di Subbagian Keuangan. Dalam penempatan di subbagian keuangan penulis melaksanakan pengelolaan transaksi bendahara pengeluaran dibawah pengawasan supervisor. Bagian Umum di Sekretariat daerah mempunyai tugas untuk merencanakan bahan dan fasilitas untuk pelaksanaan tugas, serta mengamati dan menilai pelaksanaan strategi di bidang organisasi, administrasi, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Sedangkan subbagian keuangan bertugas untuk membantu penugasan, serta mengamati dan menilai pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan, penataan dan evaluasi.

1.6 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Parasmaya, Beran, Tridadi, Beran Kidul,
Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Kode Pos : 55511
Telepon : (0274) 868405
Faksimile : (0274) 868945
Email : setda@slemankab.go.id
Website : <https://setda.slemankab.go.id>



Gambar 1.1 Lokasi Magang Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Sumber : <https://www.google.co.id/maps/place/Sekretariat+Daerah+Kabupaten+Sleman>

1.7 Jadwal Magang

Kegiatan Magang dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 31 Mei 2022. Jadwal pelaksanaan magang dijadwalkan lima hari kerja dalam seminggu serta jam kerja pukul 07.30-15.30 WIB. Dalam pelaksanaannya penulis mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Januari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey tempat magang																								
2	Pengajuan Term Of Referance																								
3	Pelaksanaan Kegiatan Magang																								
4	Bimbingan																								
5	Penyusunan Laporan Magang																								

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020), Pajak adalah pungutan wajib dari individu bagi negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai pembangunan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan tersebut diantaranya adalah pengembangan kantor fasilitas publik, membiayai rencana keuangan untuk kesejahteraan, serta kegiatan produktif lainnya dimana pemungutan pajaknya bersifat memaksa sebab dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara sesuai dengan Undang-Undang dan bersifat memaksa. Dalam membayar pajak ini tidak membawa imbalan secara langsung, akan tetapi dialokasikan untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan negara.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa menurut Undang-Undang dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara. Dari definisi yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan karakteristik yang melekat dari pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pembayar pajak tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam perkembangannya fungsi pajak menurut Trawocadji dan H.Sitabuana (2022), terdapat empat fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair atau anggaran adalah sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi ini terdapat pada sektor publik.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau pengaturan adalah suatu fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk merancang dan menjalankan kebijakan pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas adalah suatu fungsi pemerintah yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan langkah-langkah yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk mengontrol inflasi.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi merupakan pajak yang dikumpulkan negara untuk membiayai kepentingan umum termasuk pembangunan nasional.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dibebankan langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau ditunjuk kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau dipindahtangankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang tergantung pada subjeknya atau mempertimbangkan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak peduli dengan bagaimana kondisi Wajib Pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor), dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Galian C, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan).

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2019), Asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili atau Asas Tempat Tinggal

Asas domisili adalah asas pemungutan yang berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Negara memiliki hak atas pengenaan pajak dari seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berada di lingkungannya.

2. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas pemungutan yang berdasarkan sumber penghasilannya, tidak memandang dari daerah mana Wajib Pajak berasal.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah pengenaan pajaknya didasarkan atas kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam buku Mardiasmo (2018), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah kerangka kerja yang pemungutannya memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem kerangka kerja yang pemungutannya memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Wewenang tersebut diantaranya mulai dari memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah sistem yang pemungutannya memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Rahayu (2019), Pajak Penghasilan adalah kewajiban yang dimulai dari gaji orang pribadi yang sebagai salah satu bentuk kerjasama turut andil dalam mendanai pelaksanaan pembangunan pemerintah. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara terutama dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada Subjek Pajak atas

penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah kewajiban yang dapat berupa keuntungan usaha, tarif, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain.

Peraturan dan pedoman perundang-undangan penyelenggara Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019), Subjek pajak penghasilan adalah sesuatu hal yang memiliki potensi guna memperoleh penghasilan dan menjadi tujuan utama untuk dikenakan pajak penghasilan. Pengelompokan subjek pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. Subjek Orang Pribadi

Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dapat berdomisili atau bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

2. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah Subjek Pajak pengganti, menggantikan pihak yang berhak, khususnya penerima ahli waris.

3. Subjek Pajak Badan

Badan dalam pengertiannya adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang terdiri dari satu kesatuan baik yang mempertahankan bisnis maupun tidak menjalankan usaha. Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau perkumpulan yang berbeda, dan Institusi

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap atau disingkat BUT adalah jenis usaha yang tidak berkedudukan atau dipakai oleh orang Indonesia atau orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu setahun, dan badan yang tidak didirikan maupun tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau memimpin usaha di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019), Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap kelebihan keuangan yang di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang bisa digunakan untuk pemanfaatan dan peningkatan kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun. Adapun objek pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti gaji, honorarium, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, spesialis dan lain sebagainya.
2. Penghasilan dari bisnis.
3. Penghasilan dari modal yang berupa aset bergerak ataupun tidak bergerak, seperti: bunga, deviden, royalty, sewa dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk bisnis.
4. Pembebasan hutang dan hadiah.
5. Keuntungan atas selisih kurs mata uang asing.
6. Premi asuransi

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tarif pajak adalah suatu persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh). Tarif Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Tarif Umum

Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1993 dan telah direvisi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam sistem penerapannya tarif pajak dikenakan untuk dua Subjek Pajak penghasilan, yaitu:

- a. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Tabel 2 1 Tarif Pajak Penghasilan

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
2.	Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3.	Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4.	Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan, adalah sebagai berikut:

- Tarif 12,5% untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar.
- Tarif 12% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan Tarif 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 Miliar sampai dengan 50 Miliar.
- Tarif 25% untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto lebih dari 50 Miliar.

2. Tarif Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Tarif khusus Pajak Penghasilan terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali

bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dan peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah sebesar 4,8 M dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 22 atau yang selanjutnya disingkat dengan PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kantor-kantor atau yayasan-yayasan pemerintah dan badan-badan negara lainnya yang berhubungan dengan pembelian barang. Dasar hukum yang sah untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah suatu kegiatan dalam rangka memberikan fasilitas penunjang bagi instansi atau lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yang termasuk suatu kegiatan objek pajak penghasilan pasal 22 yaitu:

1. Impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kumpulan jenis produk dan kepemilikan Angka Pengenal Impor (API) bagi importirnya.
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
3. Pembelian barang oleh:
 - a. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya;
 - b. Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP);
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat sebagai penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberi kewenangan oleh KPA terkait dengan pembelian barang kepada pihak ke tiga melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
4. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu, meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan-badan tertentu yang berbentuk PT.
5. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dibidang usaha seperti; industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.
 6. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Penggerak Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat.
 7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
 8. Pembelian bahan-bahan berasal dari hasil kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau importir.
 9. Penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan.
 10. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh Wajib Pajak badan.

2.3.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Kegiatan-kegiatan yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.
2. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, air, listrik, pelumas, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
4. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah.
5. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
6. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan.
7. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Bebas (SKB).
8. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar Pengenaan Pajak atau disingkat DPP dan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterangkan bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan/atau nilai lain yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Alasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga beli atau penjualan. Besarnya DPP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Untuk harga pembelian atau penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan.
2. Untuk harga pembelian atau penjualan yang termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka perhitungan DPP adalah:

$$DPP = (100/111) \times \text{Harga Pembelian / Penjualan}$$

3. Untuk harga pembelian atau penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka perhitungan DPP adalah:

$$DPP = (100/(111+\text{Tarif PPnBM})) \times \text{Harga Pembelian / Penjualan}$$

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdiri dari dua kelompok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Umum

Dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Tarif Khusus

a. Atas Impor

- 1.) Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
- 2) Non-API = 7,5% x nilai impor;
- 3) Yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).

c. Atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak, yaitu:

- 1) Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
- 2) Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)
- 3) Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
- 4) Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak Final)

d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- 1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.
Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- g. Atas penjualan sebagai berikut:
 - 1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000.
 - 2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000
 - 3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunannya lebih dari 500 m².
 - 4) Apartemen, Kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000 dan/atau luas tanahnya lebih dari 400 m²
 - 5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

2.3.5 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak adalah suatu mekanisme dalam pelunasan pajak terutang melalui pemungutan pihak ketiga. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 bahwa pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 terdiri atas:

1. Bank Devisa Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

- a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

2.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang Dibiayai APBN/APBD

2.4.1 Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang

dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah adapun tarif dan perhitungan bagi Instansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN bagi Bendaharawan Pemerintah yang memiliki NPWP. Sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih besar 100% yaitu menjadi sebesar 3% (tiga persen).
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk yang memiliki NPWP.

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 1,5 \% \times \text{Harga Pembelian}$$

(tidak termasuk PPN)

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk yang tidak memiliki NPWP.

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 3\% \times \text{Harga Pembelian}$$

(tidak termasuk PPN)

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah: Pertama, pembayaran untuk penyerahan barang (bukan jumlah yang dibagi) meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,00. Kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos. Dan terakhir untuk pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

2.4.2 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

Direktorat Jendral Pajak (2016), mengatur pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bendahara pemerintahan bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian yang dibebaskan dari PPN pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Bendahara atas pembayaran barang oleh Wajib Pajak atau Rekanan.
2. PPh Pasal 22 pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintahan baik yang di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, BUMN atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta telah ditandatangani oleh Pemungut.
4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, harus mencantumkan NPWP pada SSP dengan diisi dua digit awal diisi dengan kode 01 untuk wajib badan dan kode 04 untuk orang pribadi, dan angka berikutnya diisi dengan 0 “no” hingga akhir.

2.4.3 Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

Direktorat Jendral Pajak (2016), mengatur tentang pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintahan, bahwa:

1. Pemungutan PPh Pasal 22 harus menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) pengeluaran negara dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan tertanggal. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana Pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-dua Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Kantor Sekretariat Daerah atau disingkat Setda merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali kota. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah atau yang disingkat Sekda yang bertugas sebagai koordinator seluruh satuan perangkat kerja pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan kepala daerah agar desentralisasi dan tugas pembantuan dapat terpenuhi. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

3.1.2 Visi dan Misi

A. Visi

Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”

1. Rumah Bersama : memiliki makna filosofis yang signifikan dimana Sleman adalah rumah bagi semua komponen masyarakat dengan landasan etnik, sosial budaya yang berbeda dan agama yang beragam..
2. Cerdas : Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan public serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu : Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment.
3. Sejahtera : Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang baik.
4. Berdaya Saing : Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang.
5. Menghargai Perbedaan : Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.

6. Memiliki Jiwa Gotong Royong : Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Misi

Misi yang dibingkai untuk kemajuan Kabupaten Sleman untuk 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) adalah:

1. Menciptakan administrasi yang hebat dengan dukungan inovasi teknologi untuk bekerja memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitar
2. Bekerja untuk menumbuh kembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pemusatan pelayanan pendidikan yang menyeluruh dan berkualitas.
3. Membangun ekonomi inventif dan kreatif untuk lebih mengembangkan kesejahteraan dan kemakmuran.
4. Tingkatkan fleksibilitas kelompok orang atau masyarakat terkait dalam menghadapi berbagai jenis bahaya dan bencana.
5. Membuat serta memperkuat fondasi yang kuat untuk membantu mendukung terciptanya wilayah yang brilian.

3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kewajiban, Fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah.

pendekatan provinsi, menyelenggarakan pelaksanaan kewajiban dan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah.

2. Fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- a. Kesiapan rencana kerja;
- b. Koordinasi pengaturan kebijakan daerah;
- c. Mengkoordinasikan perjalanan peran perangkat daerah;
- d. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. Memberikan pembinaan aparatur dan pelayanan administrasi;
- f. Menyuguhkan Pelayanan kesekretariatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli Bupati; dan
- g. Pelaksanaan berbagai kewajiban dan kemampuan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewajiban dan kemampuannya dan sesuai dengan peraturan.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Pemerintahan
- b. Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah; dan
- c. Subbagian Administrasi Kewilayahan.

2. Bagian Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Perundang-undangan;

- b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c. Subbagian Bantuan Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
- a. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subbagian Bina Mental Spiritual.

Adapun tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretariat daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- a. Koordinasi perincian strategi, pelaksanaan tugas, serta pemantauan dan penilaian pelaksanaan pengaturan komponen pemerintahan DPRD
- b. Mengkoordinasikan perincian strategi, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta mengamati dan menilai pelaksanaan pendekatan pada penyelenggaraan pemerintah dibidang kependudukan, kerukunan, dan permintaan masyarakat serta

memperhatikan keamanan daerah, umum dan politik, pertanahan serta penguatan kota;

- c. Koordinasi perincian strategi, pelaksanaan, serta pengamatan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang organisasi pemerintahan, organisasi provinsi, kerjasama, dan kemandirian wilayah;
- d. Mengkoordinasikan perincian pendekatan, pelaksanaan tugas perangkat perwilayahan, serta memeriksa dan menilai pelaksanaan pengaturan masalah pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, budaya, kesejahteraan, pemuda dan olahraga, imigrasi, perlindungan wanita dan keamanan anak, pekerjaan, pengendalian penduduk, pengaturan keluarga, serta penanggulangan bencana;
- e. Koordinasi penetapan strategi, pelaksanaan, serta pengamatan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang mental daerah dan pergantian peristiwa yang mendalam, bantuan sosial pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah;
- f. Koordinasi rencana strategi, pelaksanaan, dan pengamatan serta penilaian pelaksanaan strategi di bidang perincian peraturan dan pedoman, pelaksanaan pedoman yang sah, dan dewan dokumentasi dan data yang sah;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi pemerintahan serta alat untuk peraga di bidang

pemerintahan, peraturan, dan bantuan pemerintah perseorangan; dan

- h. Pelaksanaan berbagai kewajiban dan kemampuan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan kewajiban dan kemampuannya atau berpotensi sesuai dengan pengaturan dan pedoman.

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Subbagian Perekonomian; dan
 - c. Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

- c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun tugas dan fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki kewajiban tugas memberi kemudahan bagi Sekretariat Daerah dalam merencanakan perincian strategi, menyelenggarakan pelaksanaan usaha-usaha daerah, serta memeriksa dan menilai pendekatan di bidang ekonomi dan aset tetap, memajukan organisasi, dan dalam upaya perolehan produk atau barang.

2. Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- a. Mengkoordinasikan penetapan strategi, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan pengaturan pada usaha pemerintah di bidang usaha, industri perjalanan, industri pertukaran, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pangan, agribisnis, perikanan dan lingkungan;
- b. Mengkoordinir penetapan strategi, pelaksanaan usaha alat daerah, serta pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan dan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta transportasi;

- c. Koordinasi penetapan strategi, pelaksanaan usaha lokal, serta mengamati dan menilai pelaksanaan pendekatan yang mendukung kemampuan penataan, dan kemampuan kerja yang inovatif dan upgrading;
- d. Merencanakan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang jasa perhutanan, dan dibidang aset energi serta mineral;
- e. Mengkoordinasikan rencana pengaturan, serta mengamati dan menilai pelaksanaan pendekatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, aset normal SDA, dan ekonomi;
- f. Koordinasi penyusunan rencana strategi, pelaksanaan, serta pengecekan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang penyusunan program, pengendalian program, serta penilaian dan perincian pembangunan wilayah;
- g. Koordinasi penetapan strategi, pelaksanaan, serta pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang penanganan pengadaan barang dan jasa, pengawasan administrasi elektronik, serta pembinaan dan penegakan pengadaan produk; dan
- h. Pelaksanaan berbagai kewajiban dan kemampuan yang ditunjuk oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan

kewajiban dan kemampuan atau sesuai potensinya dengan peraturan dan pedoman.

D. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, meliputi:

1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Kepegawaian, dan Staf Ahli.
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yakni:
 - a. Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
 - b. Subbagian Protokol; dan
 - c. Subbagian Komunikasi Pimpinan
3. Bagian Organisasi
 - a. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
 - c. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Adapun tugas dan fungsi Asisten Administrasi Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

2. Fungsi Administrasi Umum

- a. Mengkoordinir pengertian pengaturan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan strategi masalah pemerintahan di bidang perpustakaan, surat menyurat, informatika, persandian, kearsipan dan komunikasi;
- b. Koordinasi perincian strategi, pelaksanaan, serta pengamatan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang administrasi otoritatif, rumah tangga, keuangan, staf ahli, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Mengkoordinasikan perincian pengaturan, pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang administrasi publik dan eksekutif, pemeriksaan kelembagaan dan kerja, serta pelaksanaan dan perubahan peraturan;
- d. Koordinasi perincian strategi, pelaksanaan kewajiban penertiban wilayah, serta pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendekatan komponen administratif, dan kemampuan kepegawaian, pembinaan dan pendidikan, serta kemampuan penunjang financial;

- e. Koordinasi penetapan strategi, pelaksanaan, serta pengamatan dan penilaian pelaksanaan strategi di bidang konvensi, dokumentasi administrasi, dan korespondensi kewenangan;
- f. Pengaturan Pelaksanaan untuk peningkatan organisasi pemerintahan dan aparatur sipil negara;
- g. Koordinasi kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan berbagai kewajiban dan kemampuan yang ditunjuk oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan kewajiban dan kemampuan atau sesuai potensinya dengan peraturan dan pedoman.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Perhitungan dan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

3.2.1.1 Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan kantor, tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawainya. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman memperoleh hasil bahwa pada

setiap transaksi pembelian barang selalu memeriksa terlebih dahulu mengenai rekanan memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Dengan tarif yang dikenakan bagi rekanan yang ber-NPWP yaitu sebesar 1,5% dan dua kali lipat sebesar 3% untuk rekanan yang tidak ber-NPWP. Tarif yang dipungut dari setiap transaksi tersebut 1,5% dari harga di atas Rp 2.000.000 yang PPN dikecualikan dan bukan merupakan jumlah yang dipisah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang besarnya pungutan, tata cara penyetoran dan pelaporan serta di setor setiap hari yang sama pada saat pembayaran pembelian barang.

Bendahara Pengeluaran sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 atas pembelian barang yang bersumber dari APBD. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara dengan Bapak Sumaryono selaku Bendahara Pengeluaran yang mengatakan bahwa :

“Kita memungut PPh pada waktu kita membayar, membayar rekanan, membayar transaksi itu kita potong dari DPP nya. DPP itu dari nilai transaksi atau nilai di nota itu di kali 100/111 nah itu untuk DPP nya. Terus tarif nya PPh 22 1,5 % (satu koma lima persen) dari DPP. Itu yang kita potong pada saat transaksi”.

Berikut akan disajikan salah satu sampel tabel data pemungutan yang diperoleh penulis atas transaksi pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang dikenakan PPh Pasal 22 masa bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh
Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman**

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
01 Maret 2022	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Android TV ruang wakil bupati)	Rp19.400.000,00	Rp17.636.363,64	Rp 264.545,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 9.800.000,00	Rp 9.800.000,00	Rp 147.000,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.100.000,00	Rp 2.100.000,00	Rp 31.500,00
04 Maret 2022	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp 9.800.000,00	Rp 8.909.090,91	Rp 133.636,00
04 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 7.500.000,00	Rp 6.818.181,82	Rp 102.272,00
10 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
11 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.650.000,00	Rp 3.318.181,82	Rp 49.773,00

Sumber : Data Olahan mandiri (2022)

Berikut penjelasan perolehan pajak terutang salah satu transaksi dari tabel diatas yang dihitung menggunakan rumus $100/110$ di kali harga pembelian untuk mencari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk menghitung besaran pajak PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% (persen)

yaitu dengan rumus tarif di kali dengan DPP. Contoh perhitungan atas transaksi pada tanggal 1 Maret 2022 terkait pembelian barang berupa belanja modal alat rumah tangga (Android TV ruang wakil bupati) sebesar Rp 19.400.000,00 perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Harga pembelian}$$

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp } 19.400.000,00$$

$$= \text{Rp } 17.636.363,64$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= 1,5\% \times \text{Rp } 17.636.364,00$$

$$= \text{Rp } 264.545,46$$

$$= \text{Rp } 264.545,00 \text{ (Pembulatan)}$$

Daftar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 periode bulan Maret-Mei 2022 atas pembelian barang yang dikenakan pajak terutang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 7.

Dalam pelaksanaannya proses estimasi telah sesuai dengan pedoman yang ada, namun ditemukan terjadinya kesalahan terkait pemungutannya. Kesalahan pertama yang terjadi yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada tanggal 16 maret 2022 yang pembayarannya sebesar Rp 1.114.000 dan Rp 1.327.000 dimana nominal tersebut tidak dikenakan atas pemungutan PPh Pasal 22. Selanjutnya kesalahan kedua yaitu Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman melakukan pemungutan terhadap kegiatan Belanja Suku Cadang Alat Angkut yang kemungkinan berkenai PPh Pasal 22 yang seharusnya belanja jasa dikenakan PPh Pasal 23. Hal tersebut berbeda dengan yang telah diutarakan Bapak Sumaryono dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Belanja diatas 2 juta itu kena dibawah 2 juta tidak kena. Terus untuk inputnya *e-billing* dan e-bupot itu pakai nama rekanan dan NPWP rekanan. Untuk rekanan yang tidak ber-NPWP pakainya NIK sekarang, terus tarifnya nanti 2 kali lipat jadi 3%”.

Berikut tabel contoh transaksi pada tanggal 16 maret 2022 atas pemungutan PPh Pasal 22 yang terjadi kesalahan :

Tabel 3.2 Daftar Kesalahan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
16 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp1.144.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 13.110,00
16 Maret 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp1.327.000,00	Rp 1.206.363,64	Rp 19.905,00

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

Sejalan dengan penerapan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang di potong oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang terdapat perhitungan yang berbeda yaitu pada bulan maret dan bulan april. Perbedaan itu terjadi karena pada bulan april diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29

Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen), dimana pada bulan sebelumnya yakni bulan maret tarif PPN masih sebesar 10% (sepuluh persen). Hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan DPP Pajak Penghasilan Pasal 22. Berikut adalah contoh perbedaan perhitungan antara PPh Pasal 22 bulan maret dan april :

1. Perhitungan PPh Pasal 22 bulan maret dengan PPN 10% (sepuluh persen).

Tanggal 1 Maret 2022 melakukan pembelian Android TV Ruang Wakil Bupati Sleman senilai Rp 19.400.000,00

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Harga pembelian} \\ \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp } 19.400.000,00 \\ &= \text{Rp } 17.636.363,64 \\ &= \text{Rp } 17.636.364,00 \text{ (Pembulatan)} \\ \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 17.636.364,00 \\ &= \text{Rp } 264.545,46 \\ &= \text{Rp } 264.545,00 \text{ (Pembulatan)} \end{aligned}$$

2. Perhitungan PPh Pasal 22 bulan april dengan PPN 11% (sebelas persen).

Tanggal 6 April 2022 melakukan pembelian barang Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman sebesar Rp 2.500.000,00

$$\begin{aligned}
\text{DPP} &= 100/111 \times \text{Harga pembelian} \\
\text{DPP} &= 100/111 \times \text{Rp } 2.500.000,00 \\
&= \text{Rp } 2.252.252,25 \\
&= \text{Rp } 2.252.252,00 \text{ (Pembulatan)} \\
\text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\
&= 1,5\% \times \text{Rp } 2.252.252,00 \\
&= \text{Rp } 33.783,78 \\
&= \text{Rp } 33.783,00 \text{ (Pembulatan)}
\end{aligned}$$

Perbedaan perhitungan dari bulan maret dan april tersebut terlihat dari rumus perhitungan dalam mencari DPP nya. Dimana pada bulan maret rumus mencari DPP yaitu dengan rumus 100/110 karena PPN masih 10% (sepuluh persen). Sedangkan pada bulan april rumus untuk mencari DPP yaitu dengan rumus 100/111 karena PPN menjadi 11% (sebelas persen).

3.2.1.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 instansi pemerintah memiliki komitmen untuk memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 yang terutang untuk setiap pembayaran yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan pajak PPh Pasal 22. Berdasarkan peraturan tersebut penyetoran paling lambat adalah 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya pembayaran.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban untuk menyampaikan setoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang ke kas negara melalui pos persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bank yang ditunjuk untuk menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada kantor adalah Bank BPD DIY. Hal tersebut diutarakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam wawancara atas penyetoran PPh Pasal 22, yang menyatakan bahwa:

“Ya itu tadi penyetorannya juga melalui bank BPD. Terus tarif nya PPh 22 1,5 % dari DPP, itu yang kita potong pada saat transaksi. sekaligus kita bayarkan melalui BPD DIY dengan aplikasi CMS. Terus nanti BPD DIY yang membayarkan sesuai id-billing”.

Adapun data sampel terkait penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Kabupaten Sleman masa bulan Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
01 Maret 2022	01 Maret 2022	Rp 264.545,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 147.000,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 33.750,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 31.500,00
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 133.636,00
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 102.272,00
10 Maret 2022	10 Maret 2022	Rp 33.750,00
11 Maret 2022	11 Maret 2022	Rp 49.773,00

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

Daftar penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan pajak terutang periode masa pajak bulan Maret-Mei 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 8.

Dalam pelaksanaannya Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran PPh Pasal 22 pada tanggal pembayaran atau 1 (satu) hari setelah tanggal pembayaran. Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau SSP, dimana dalam melakukan penyetoran tersebut disertai dengan pencetakan e-bupot dan *e-billing*. Sebagaimana *e-billing* yang nantinya digunakan sebagai dasar penyetorannya oleh bank BPD DIY yang ditunjuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman untuk menyetorkan pemungutan pajak terutang melalui aplikasi CMS yang memiliki kepanjangan Cash Management System. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung PPh Pasal 22 tersebut diutarakan pada saat wawancara dengan Bapak Sumaryono yang mengatakan :

“Untuk dokumen yaitu ada nota, terus kita hitung sendiri secara rumus masukkan kerumus, udah ketemu pajaknya baru kita buat *e-billing* dan e-bupot”.

Adapun tabel data sampel kesesuaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuatu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 untuk masa pajak bulan maret 2022, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Daftar Kesesuaian Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas
Pembelian Barang**

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
01 Maret 2022	01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tepat Waktu
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tepat Waktu
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tepat Waktu
10 Maret 2022	10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
11 Maret 2022	11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tepat Waktu

Sumber : Data Olahan Mandiri 2022

Daftar tabel kesesuaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran yang terjadi selama periode bulan maret-april 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat di lampiran 8.

3.2.1.3 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Pelaporan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan atau SPT yang dipergunakan sebagai cara untuk melaporkan dan mencatat perkiraan besarnya biaya terutang yang harus dibayar.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 instansi pemerintah diharapkan melaporkan pemotongan dan/atau

pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu masa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana instansi pemerintah terdaftar. Namun, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh 22 karena penggunaan aplikasi yang masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi. Hal tersebut didapatkan berdasarkan wawancara dengan selaku Bendahara Pengeluaran yaitu Bapak Sumaryono, yang mengatakan bahwa:

“Pelaporan kita belum baru akan mulai, karena masih aplikasi baru kan. Tapi kita baru tahap belajar ini, baru sosialisasi. Sejak 2020 itu sudah ada, tapi sosialisasi itu sampai bulan april. Kita dah mulai february 2022 itu baru mulai aplikasinya. Terus januari sampai april itu sosialisasi tapi sampai saat ini masih sosialisasi”.

Berikut adalah data sampel daftar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman periode Maret 2022, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5 Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tidak Dilaporkan
04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tidak Dilaporkan
04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan
10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tidak Dilaporkan

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

Daftar pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan pajak terutang periode masa pajak Maret-Mei 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 9.

Penyampaian pelaporan Pajak Penghasilan 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Akan tetapi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman tidak melaporkan SPT masa ke KPP tempat dimana Instansi Pemerintah terdaftar. Alasan kenapa tidak dilaporkannya SPT dikarenakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman masih dalam tahap belajar dan tahap sosialisasi menggunakan aplikasi baru tentang perpajakan. Yang baru terealisasi yaitu pemungutan dan pelaporannya saja, sehingga pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Berikut tabel daftar kesesuaian pelaporan PPh Pasal 22 bulan maret atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman :

Tabel 3.6 Daftar Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Masa Pajak	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Keterangan
-------------------	---------------------	----------------------	-------------------

(Tanggal)			
01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

Daftar data kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman periode Masa Pajak maret-april 2022 dapat dilihat di lampiran 9.

3.2.2 Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dengan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil dari pembahasan terkait sub bab diatas, berikut akan dipaparkan perbandingan antara teori Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dengan Praktik Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan atas pembelian barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Peraturan/Teori dengan Praktik di Lapangan

No.	Teori Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022	Praktik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Pasal 12 ayat (1) : Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu pemungutan Pajak Penghasilan terkait dengan pembayaran atas pembelian barang.	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan terhadap Pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran. Tarif yang dibebankan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian yang tidak termasuk PPN.	Sesuai
2	Pasal 12 ayat (2) huruf a : Pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan pembayaran paling banyak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.	Atas pembelian barang yang dilakukan Bendahara Pengeluaran terdapat beberapa pembayaran dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22	Tidak Sesuai
3	Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b : Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipungut dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran dengan Uang Persediaan atau pada hari yang sama dengan	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama saat melakukan pembayaran dan 1 (satu) hari berikutnya atas pembelian barang. Penyetoran dilaksanakan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk yaitu	Sesuai

No.	Teori Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022	Praktik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	Sesuai / Tidak Sesuai
	pembayaran melalui mekanisme uang Langsung.	Bank BPD DIY pada hari yang sama pada saat melakukan pembayaran atas pembelian barang.	
4	Pasal 25 ayat (1), (2) huruf b : Instansi Pemerintah wajib melaporkan pemungutan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atas pembelian barang yang dilakukan Instansi Pemerintah	Bendahara Pengeluaran belum pernah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya sebatas pemungutan dan penyetoran saja.	Tidak Sesuai
5	Pasal 25 ayat (3) : Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.	Bendahara Pengeluaran tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan penggunaan aplikasi pajak yang masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi.	Tidak Sesuai

Sumber : Data Olahan Mandiri (2022)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran telah dilakukan dengan tepat dan benar terkait tarif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, yaitu terkait dengan ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pembelian dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Dimana dalam pelaksanaannya harga pembelian dibawah Rp 2.000.000 masih terdapat beberapa yang dikenakan PPh Pasal 22.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Bendahara Pengeluaran telah dilakukan dengan tepat waktu yaitu penyetoran dilaksanakan pada hari di saat terjadinya pembayaran atau 1 (satu) hari setelah pembayaran atas pembelian barang, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

4. Pelaksanaan pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, Bendahara Pengeluaran belum pernah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 karena masih dalam penggunaan aplikasi baru terkait pajak dan masih dalam tahap belajar.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, yaitu :

1. Pemungutan yang dilakukan harus lebih teliti dalam mengkategorikan harga pembelian yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman harus mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan yang ada, sehingga pelaksanaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai-pegawainya untuk bisa lebih tanggap dalam menghadapi perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi khususnya terkait perpajakan dan supaya pegawai memahami prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

cara memberikan pelatihan seperti pelatihan pajak, diklat pajak dibidang perpajakan, atau sosialisasi penggunaan aplikasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA


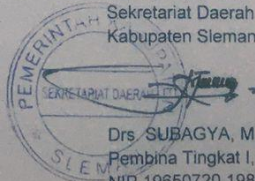
- Damanik , E., & Sriwiyanti, E. (2020). *Perpajakan*. INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Bendahara Wajib Pajak*. Jakarta Selatan: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak dan Bisnis V.3*, 35-50.
- Nasir, M. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 30-45.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.2 Tahun 2020. (2020). *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah*. Sleman: Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017. (2017). *Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Indonesia: Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. (2022). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan. Edisi Pertama*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

- Rahayu, P. (2022, January 3). *APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Retrieved June 15, 2022, from Kemenkeu/Siaran Pers APBN 2021: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi S.E, S. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 173-183.
- Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 704-714.
- Trawocadji, F. D., & H.Sitabuana, T. (2022). Hukum pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Serina IV Untar*, 239-244.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2013). *Tentang Pajak Penghasilan*. Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 81-89.
- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan

Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 545-554.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang

	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SEKRETARIAT DAERAH <i>ꦥꦼꦩꦸꦠꦫꦏꦧꦱꦭꦼꦩꦤ꧀</i> Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945 Laman: setda.slemankab.go.id, Surel: setda@slemankab.go.id
Sleman, 21 Januari 2022	
Nomor : 423/0183	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan
Hal : Praktek Kerja Lapangan/ Magang	Ekonomika
	u.p. Ketua Program Studi D3 Akuntansi
	Universitas Islam Indonesia
	di Sleman.
<p>Kami sampaikan dengan hormat, bahwa menindaklanjuti Surat dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia nomor: 005.039/Ket/20/Akd/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, hal permohonan praktek kerja lapangan/magang FBE UII, bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia memberi kesempatan praktek kerja lapangan/magang kepada:</p> <ol style="list-style-type: none">Nama : Elita Niswatun Afifah NIM. : 19212013 Jurusan : AkuntansiNama : Tannia Dyah Puspita NIM. : 19212036 Jurusan : Akuntansi <p>Kegiatan praktek kerja lapangan/magang dilaksanakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman mulai dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek kerja lapangan/magang, dimohon untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan menghubungi pesawat telepon (0274) 868 405 ext 7159.</p> <p>Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>a.n. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum u.b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman</p>  <p>Drs. SUBAGYA, M.M. Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19650720 198602 1 006</p>	

Lampiran 2 : Wawancara Penelitian

WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman?

Pak Sumaryono : "Kita memungut PPh pada saat waktu kita membayar, membayar rekanan, membayar transaksi itu kita potong dari DPP-nya. DPP itu dari nilai transaksi atau nilai di nota itu di kali 100/111 nah itu untuk DPPnya. Terus tarifnya PPh 22 1,5% dari DPP itu kita potong pada saat transaksi. Sekaligus kita bayarkan melalui BPD DIY dengan aplikasi CMS. Terus nanti BPD DIY yang membayar ke id-billing".

2. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh Pasal 22 di sekretariat Daerah?

Pak Sumaryono : "Ya itu tadi pelaporannya juga melalui bank BPD DIY".

3. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 di Sekretariat Daerah ?

Pak Sumaryono : " Pelaporan kita belum baru akan mulai, karena masih aplikasi baru kan,".

4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk, perhitungan, pemungutan, penyetoran PPh Pasal 22 ?

Pak Sumaryono : "Untuk dokumen yaitu ada nota, terus kita hitung sendiri secara rumus masukkan kerumus, udah ketemu pajaknya baru kita buat e-billing dan e-bupot itu"

5. Jenis pembelian barang apa yang dikenakan PPh Pasal 22 ?

Pak Sumaryono : "Jenisnya itu dikecualikan kalau PPh 22, belanja diatas 2 juta itu kena dibawah 2 juta tidak kena. Terus untuk inputnya id-billing dan e-bupot itu pakai nama rekanan dan NPWP rekanan. Untuk rekanan yang tidak ber-NPWP pakainya NIK sekarang, terus tarifnya nanti 2 kali lipat jadi 3%".

6. Jika pelaporan PPh Pasal 22 tidak dilakukan, apakah ada denda administrasi yang diterima ?

Pak Sumaryono : "Iya ada denda, tapi selama ini kita belum yang instansi pemerintah belum pernah kena denda. Memang seharusnya peraturannya kena denda, perbulan itu kalau dulu Rp 100.000 kalau tidak laporan. Dan pelaporan dilakukan sebulan sekali sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

7. Apakah dalam mekanisme PPh Pasal 22 keseluruhannya telah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku?

Pak Sumaryono : “ Iya sudah, kan sekarang sudah pakai e-bupot itu yang terbaru. Tapi kita baru tahap belajar ini baru sosialisasi. Sejak 2020 itu sudah ada tapi sosialisasi itu sampai bulan april. Kita dah mulai february 2022 itu baru mulai aplikasinya. Terus dari januari sampai april itu sosialisasi tapi sampai sekarang masih sosialisasi.

RECORD WAWANCARA

Voice Memos

Record Wawancara PPh Pasal 22 SETDA

23 Jun 2022





14.24

0.00

-14.24




Lampiran 3 : Cetak e-billing PPh Pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 02.477.807.8-542.000	
NAMA	: CIPTA KHARISMA	
ALAMAT	: PERUMAHAN GRIYA PESONA SIDOARUM ,TANGKILAN	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411122	
JENIS SETORAN	: 920	
MASA PAJAK	: 0303	
TAHUN PAJAK	: 2022	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR TERBILANG	: 264.545	
	: Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah	
URAIAN	: -	
NPWP PENYETOR	: 00.136.821.6-542.000	
NAMA PENYETOR	: BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN		
ID BILLING	: 026229219257015	
MASA AKTIF	: 31/03/2022 10:36:20	
Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat		
<i>Setda Sln</i> . 000000095707		
	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran	Tanggal dan Jam Bayar : 01/03/2022 13:53:56	NTB : 016330100047
Tanggal Buku : 02/03/2022		NTPN : 5138900NRBRKNQLN
Kode Cabang Bank : 005		STAN : 178212
Data Setoran	Kode Billing : 026229219257015	
NPWP : 024778078542000		
Nama Wajib Pajak : CIPTA KHARISMA		
Alamat : PERUMAHAN GRIYA PESONA SIDOARUM ,TANGKILAN - KAB.		
Nomor Objek Pajak : 411122		
Mata Anggaran : 920		
Jenis Setoran : 03032022		
Masa Pajak : 0000000000000000		
Nomor Ketetapan : 264.545,00		Mata Uang: IDR
Jumlah Setoran : ==dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh		
Terbilang : lima rupiah==		
This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan		
01-MAR-2022	01-MAR-2022 13:54:19	
UTAMA	SLEMAN	
001.111.001407	7002 01633	
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT		
*****264.545,00K	000000095707	
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP	026229219257015	942090

Lampiran 4 : Cetakan Bukti Potong PPh Pasal 22

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23**

FORMULIR BPPU

H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0

H.2 Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 0 2 4 7 7 8 0 7 8 5 4 2 0 0 0

A.2 NIK : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

A.3 Nama : CIPTA KHARISMA

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memilik NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
3	22-920-01	17.636.363		1.50	264.545

Keterangan Kode Objek Pajak : Pembelian barang oleh Pemungut Bendaharawan APBD

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 010/ICV.CK/III/2022
 Nama Dokumen Invoice Tanggal 0 1 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 Tanggal [] [] dd [] [] mm [] [] [] [] yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 Tanggal [] [] dd [] [] mm [] [] [] [] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 0 0 1 3 6 8 2 1 6 5 4 2 0 0 0


C.2 Nama Wajib Pajak : BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN

C.3 ID Subunit Organisasi : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

C.4 Tanggal : 0 1 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy

C.5 Nama Penandatanganan : SUMARYONO


C.6 Pernyataan Wajib Pajak :
 Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik.
 Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak, maka akan diujikan:
 permohonan pemindahan oleh Pemotong/Pemungut Pajak



BOBIEKJJ

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini dinyatakan sah dan sda diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini.

Lampiran 5 : Bukti Pembayaran PPh Pasal 22




NOMOR REFERENSI : 301141194194
REKENING SUMBER : 005111000335
COMPANY ID : 0050000252
NAMA FILE : 736.csv
DESKRIPSI : Belanja TV Android ruang
TRX TOTAL : Rp 1,763,636.00
Tipe Transaksi : Bulk Internal
TANGGAL PROSES : 01-Mar-2022
TOTAL RECORD : 3
STATUS TRANSAKSI : Berhasil

No. Rekening	Nama Rekening	Nama Penerima	Jumlah	Tipe Transfer	Keterangan	TRX Status
006111000593	CIPTA KHARISMA	CIPTA KHARISMA, CV	Rp 17,371,819.00	Internal	Belanjamodalalatrumahtanggalberhasil ainnyaAndroi	Berhasil
005929000239	PEMBAYARAN PAJAK VIA	PEMBAYARAN PAJAK VIA	Rp 1,763,636.00	Internal	PPN026229218315104	Berhasil
005929000239	PEMBAYARAN PAJAK VIA	PEMBAYARAN PAJAK VIA	Rp 264,545.00	Internal	PPH22026229219257015	Berhasil

Bukti ini merupakan bukti transaksi yang sah, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dari Bank BPD DIY.

Tuesday 01 March 2022 Page 1 of 1

Lampiran 6 : Invoice Pembelian Barang



CV. CIPTA KHARISMA

Perum Griya Pesona Sidoarum No E.19 Tangkilan RT 06 RW 23
Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, Telp. 087845760777

INVOICE


No : 010/CV.CK/III/2022

Kepada Yth :
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sleman (SEKDA)
Jl: Parasamnya Beran ,Tridadi Kec. Sleman Kab Sleman

NO	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pengadaan Android TV 65 "	1 unit	Rp 19.400.000,-	Rp 19.400.000,-
	Merk SONY Android TV 65"			
	Sony 65" Sony barvia X80J4K HDR 65 inch			
	4K HDR PROCESSOR X1			
	Prosesor TV Canggih yg menghadirkan			
	gambar yg halus dan jernih penuh warna			
	yg kaya dan kontras yg detail.			
	TRILUMINOS Pro"			
	memproduksi lebih banyak warna			
	daripada TV konvensional sehingga			
	menghasilkan kualitas gambar			
	yg alami dan presisi, serta lebih			
	mendekati kehidupan nyata.			
	Jumlah			Rp 19.400.000,-

Terbilang : (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
Harga sudah termasuk pajak-pajak

Sleman, 1 Maret 2022
CV. CIPTA KHARISMA



Catur Dwi Santoso,SE
Pimpinan

Lampiran 7 : Rekening Pemindahbukuan Pembelian Barang

EMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Sekretariat Daerah
DAFTAR REKENING PEMINDAH BUKUAN

Nomor : 00736/Bag. Umum/III/2022
 Lamp: -
 Perihal : Pemindahbukuan uang
 Kepada Yth.
 PT. Bank BPD DIY
 Cabang : Sleman
 di : Sleman

Dengan ini harap pemindahbukuan uang sebesar **Rp.19.400.000,00 (Semblilan Belas Juta Empat Ratus Ribu koma nol nol rupiah)**, dari Rekening Nomor: 005111000335 Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan : 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Rekening : 520205020006 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	Nama Penertma	No. Rek Tujuan	Bank Tujuan	Nominal (Nominal+Adm)	PPN	Pph 21	Pph 22	Pph 23	Pph 17	Jenis Pph Lain	Nilai Pph Lain	Pjk. Resto	Biaya Admin	Nilai Netto (Nominal+Adm)-Pajak-Adm)	Nama dan Paraf Penertma Barang	Keterangan
1	KHARISMA CV	006.111.000593	BANK BPD DIY	19.400.000,00	1.763.636,00	0,00	264.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.371.819,00	Avianda Harmawan	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Android TV/ ruanq wakil bupati)
Jumlah				19.400.000,00	1.763.636,00	0,00	264.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.371.819,00		

NIN: 00736/REKENINGDAIRYUAN/13.06.02.00.01.0008/2022

Mengetahui dan menyetujui,
 Sekretaris Daerah
 H. HARDAKUSWAYA, SE., M.Si
 NIP.1964012619930031004

Sleman, 01 Maret 2022
 Bendahara Pengeluaran
 SUNARWONO
 NIP.197206222007011008

di buatkan 01241
 Tanggal: 1/03/2022
 Paraf: 22 JUN 2022
 Tanggali:
 Paraf:

*)Dokumentasi ini sekaligus berfungsi sebagai bukti kas keluar

Dicetak oleh SISU

Halaman 1 dari 1

Pemerintah Kabupaten Sleman

Lampiran 8 : Pemungutan PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022

Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Maret 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
01 Maret 2022	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Android TV ruang wakil bupati)	Rp 19.400.000,00	Rp 17.636.363,64	Rp 264.545,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 9.800.000,00	Rp 9.800.000,00	Rp 147.000,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
02 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.100.000,00	Rp 2.100.000,00	Rp 31.500,00
04 Maret 2022	Belanja Bahan-Bahan Bibit Tanaman	Rp 9.800.000,00	Rp 8.909.090,91	Rp 133.636,00
04 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 7.500.000,00	Rp 6.818.181,82	Rp 102.272,00
10 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
11 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.650.000,00	Rp 3.318.181,82	Rp 49.773,00
14 Maret 2022	Belanja bahan kebutuhan pokok rumah dinas bupati Sleman-Natura	Rp 2.500.000,00	Rp 2.272.727,27	Rp 68.182,00
14 Maret 2022	Belanja bahan kebutuhan pokok rumah dinas wakil bupati Sleman-Natura	Rp 2.500.000,00	Rp 2.272.727,27	Rp 34.090,00
14 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 6.000.000,00	Rp 5.454.545,45	Rp 81.818,00
14 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 9.500.000,00	Rp 8.636.363,64	Rp 129.545,00
14 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 9.500.000,00	Rp 8.636.363,64	Rp 129.545,00
14 Maret 2022	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 2.500.000,00	Rp 2.272.727,27	Rp 34.090,00
15 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
15 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 45.000,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
15 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 90.000,00
15 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
15 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 27.885.500,00	Rp 25.350.454,55	Rp 418.282,00
16 Maret 2022	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 15.100.000,00	Rp 13.727.272,73	Rp 205.909,00
16 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 1.144.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 13.110,00
16 Maret 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 1.327.000,00	Rp 1.206.363,64	Rp 19.905,00
17 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 4.000.000,00	Rp 3.636.363,64	Rp 60.000,00
17 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 40.500,00
17 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
17 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 13.530.000,00	Rp 12.300.000,00	Rp 184.500,00
21 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 937.900,00	Rp 852.636,36	Rp 14.068,00
21 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 633.950,00	Rp 576.318,18	Rp 9.509,00
21 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 4.050.000,00	Rp 3.681.818,18	Rp 60.750,00
22 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.625.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp 39.375,00
22 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 5.250.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 78.750,00
22 Maret 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati	Rp 7.500.000,00	Rp 6.818.181,82	Rp 102.272,00
22 Maret 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 9.500.000,00	Rp 8.636.363,64	Rp 259.091,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
22 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 6.394.000,00	Rp 5.812.727,27	Rp 95.910,00
22 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 4.522.500,00	Rp 4.111.363,64	Rp 67.837,00
22 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 116.950,00	Rp 116.950,00	Rp 1.754,00
24 Maret 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 240.000,00	Rp 218.181,82	Rp 3.600,00
24 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 340.000,00	Rp 309.090,91	Rp 4.500,00
25 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	Rp 1.842.400,00	Rp 1.674.909,09	Rp 24.675,00
28 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 2.908.640,00	Rp 2.644.218,18	Rp 38.955,00
28 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 1.412.500,00	Rp 1.284.090,91	Rp 19.261,00
28 Maret 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 1.250.000,00	Rp 1.136.363,64	Rp 17.045,00
31 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 9.900.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 135.000,00
31 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 6.300.000,00	Rp 5.727.272,73	Rp 85.909,00
31 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.150.000,00	Rp 2.863.636,36	Rp 42.954,00
31 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 7.347.999,00	Rp 6.679.999,09	Rp 110.219,00
31 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
31 Maret 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 50.625,00
31 Maret	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
2022	Jamuan Tamu			
31 Maret 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 33.414.000,00	Rp 30.376.363,64	Rp 455.645,00
	JUMLAH			Rp 4.372.156,00

Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan April 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
01 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 90.000,00
01 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 45.000,00
06 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp20.550.000,00	Rp 20.550.000,00	Rp 308.250,00
06 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 33.784,00
06 April 2022	Belanja Bahan Dan Pangan Setda	Rp 3.000.000,00	Rp 2.702.702,70	Rp 40.540,00
06 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 33.783,00
06 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 5.000.000,00	Rp 4.504.504,50	Rp 67.567,00
06 April 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp 4.000.000,00	Rp 3.603.603,60	Rp 54.054,00
07 April 2022	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	Rp 3.800.000,00	Rp 3.423.423,42	Rp 51.351,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp 101.250,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.650.000,00	Rp 4.650.000,00	Rp 69.750,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
07 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
11 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.500.000,00	Rp 3.153.153,15	Rp 47.297,00
11 April 2022	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp 5.400.000,00	Rp 4.864.864,86	Rp 72.972,00
11 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 5.000.000,00	Rp 4.504.504,50	Rp 67.567,00
11 April	Belanja Alat/Bahan untuk	Rp 5.600.000,00	Rp 5.045.045,05	Rp 75.675,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
2022	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
11 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman	Rp 7.500.000,00	Rp 6.756.756,76	Rp 101.351,00
11 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 9.500.000,00	Rp 8.558.558,56	Rp 128.378,00
11 April 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 4.326.000,00	Rp 3.897.297,30	Rp 58.990,00
11 April 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 1.972.500,00	Rp 1.777.027,03	Rp 26.897,00
11 April 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 1.933.000,00	Rp 1.741.441,44	Rp 22.677,00
11 April 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 1.042.000,00	Rp 938.738,74	Rp 14.209,00
12 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 8.050.000,00	Rp 8.050.000,00	Rp 120.750,00
12 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 225.000,00
12 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 56.250,00
13 April 2022	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	Rp13.475.000,00	Rp 12.139.639,64	Rp 182.094,00
18 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.800.000,00	Rp 1.621.621,62	Rp 24.324,00
18 April 2022	Belanja Hiasan Dinding	Rp11.270.000,00	Rp 10.153.153,15	Rp 152.297,00
19 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 50.625,00
19 April 2022	Belanja Pakan Ikan dan Burung Rumah Dinas Bupati dan Setda	Rp 3.400.000,00	Rp 3.063.063,06	Rp 91.891,00
19 April 2022	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp16.912.500,00	Rp 15.236.486,49	Rp 228.547,00
19 April 2022	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp 5.700.000,00	Rp 5.135.135,14	Rp 77.027,00
19 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.825.000,00	Rp 3.825.000,00	Rp 57.375,00
19 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
20 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
21 April 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	Rp 3.431.250,00	Rp 3.091.216,22	Rp 45.750,00
22 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.025.000,00	Rp 2.025.000,00	Rp 30.375,00
22 April 2022	Belanja Pengharum Ruangan Setda	Rp 7.414.799,00	Rp 6.679.999,10	Rp 100.199,00
22 April 2022	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik Jaringan Listrik Lainnya	Rp17.915.400,00	Rp 16.140.000,00	Rp 242.100,00
26 April 2022	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp48.600.000,00	Rp 43.783.783,78	Rp 656.756,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.875.000,00	Rp 7.875.000,00	Rp 118.125,00
26 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 9.500.000,00	Rp 8.558.558,56	Rp 128.378,00
26 April 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman	Rp 9.500.000,00	Rp 8.558.558,56	Rp 128.378,00
26 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.150.000,00	Rp 2.837.837,84	Rp 42.567,00
26 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 2.700.000,00	Rp 2.432.432,43	Rp 36.486,00
26 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	Rp 2.250.000,00	Rp 2.027.027,03	Rp 30.405,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.925.000,00	Rp 2.925.000,00	Rp 43.875,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 51.750,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.900.000,00	Rp 6.900.000,00	Rp 103.500,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
26 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp38.241.600,00	Rp 34.451.891,89	Rp 573.624,00
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
26 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
27 April 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.669.500,00	Rp 3.305.855,86	Rp 55.042,00
27 April 2022	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp20.000.000,00	Rp 18.018.018,02	Rp 270.273,00
27 April 2022	Belanja Umbul-Umbul Setda	Rp 5.500.000,00	Rp 4.954.954,95	Rp 74.324,00
27 April 2022	Belanja 2 Set Bed Cover Rumah Dinas Bupati	Rp 4.400.000,00	Rp 3.963.963,96	Rp 59.459,00
27 April 2022	Belanja Taplak Meja Rumah Dinas Wakil Bupati	Rp 2.200.000,00	Rp 1.981.981,98	Rp 29.729,00
27 April 2022	Belanja Sarung Kursi Rumah Dinas Bupati	Rp 3.850.000,00	Rp 3.468.468,47	Rp 52.027,00
27 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 50.625,00
27 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp 101.250,00
27 April 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
27 April 2022	Belanja Thermometer Standing + Tripod Setda	Rp 7.326.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 99.000,00
JUMLAH				Rp 6.610.269,00

Daftar Pemungutan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Mei 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
10 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.056.000,00	Rp 1.852.252,25	Rp 27.783,00
10 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.025.000,00	Rp 2.025.000,00	Rp 30.375,00
10 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.050.000,00	Rp 4.050.000,00	Rp 121.500,00
10 Mei 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 67.568,00
10 Mei 2022	Belanja Bahan Pangan Setda	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 33.783,00
10 Mei 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman	Rp 2.500.000,00	Rp 2.252.252,25	Rp 81.081,00
10 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 6.000.000,00	Rp 5.405.405,41	Rp 33.783,00
10 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 7.500.000,00	Rp 6.756.756,76	Rp 101.351,00
17 Mei 2022	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	Rp 4.111.875,00	Rp 3.704.391,89	Rp 54.825,00
17 Mei 2022	Belanja Modal Alat Dapur	Rp 3.718.500,00	Rp 3.350.000,00	Rp 50.250,00
18 Mei 2022	Belanja Modal Televisi (Rumah Dinas Bupati)	Rp 15.700.000,00	Rp14.144.144,14	Rp 212.162,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 14.040.000,00	Rp14.040.000,00	Rp 210.600,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.560.000,00	Rp 7.560.000,00	Rp 226.800,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.470.000,00	Rp 7.470.000,00	Rp 224.100,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.470.000,00	Rp 7.470.000,00	Rp 112.050,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
18 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.425.000,00	Rp 7.425.000,00	Rp 111.375,00
19 Mei 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 6.300.000,00	Rp 5.675.675,68	Rp 74.121,00
19 Mei 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 1.654.000,00	Rp 1.490.090,09	Rp 22.351,00
19 Mei 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 6.270.000,00	Rp 5.648.648,65	Rp 84.729,00
19 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
19 Mei 2022	Belanja Bahan Pangan Kebutuhan Sekretariat Daerah	Rp 3.500.000,00	Rp 3.153.153,15	Rp 94.594,00
19 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 90.000,00
19 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 45.000,00
20 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 2.804.750,00	Rp 2.526.801,80	Rp 37.902,00
23 Mei 2022	Belanja 500 buah goody bag	Rp 6.750.000,00	Rp 6.081.081,08	Rp 91.216,00
23 Mei 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Bupati Sleman	Rp 9.500.000,00	Rp 8.558.558,56	Rp 256.756,00
23 Mei 2022	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman	Rp 7.500.000,00	Rp 6.756.756,76	Rp 101.351,00
23 Mei 2022	Belanja backdrop	Rp 2.520.000,00	Rp 2.270.270,27	Rp 34.054,00
23 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Ceta	Rp 600.000,00	Rp 540.540,54	Rp 9.000,00
23 Mei 2022	Belanja pengharum ruangan Setda	Rp 7.414.799,00	Rp 6.679.999,10	Rp 100.199,00
23 Mei 2022	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 13.100.000,00	Rp 11.801.801,80	Rp 177.027,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
23 Mei 2022	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 8.160.000,00	Rp 7.351.351,35	Rp 110.270,00
24 Mei 2022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 1.852.000,00	Rp 1.668.468,47	Rp 25.027,00
25 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.078.000,00	Rp 2.772.972,97	Rp 41.594,00
25 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 820.700,00	Rp 739.369,37	Rp 11.090,00
25 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
25 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
25 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 36.000,00
25 Mei 2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp 5.000.000,00	Rp 4.504.504,50	Rp 67.567,00
27 Mei 2022	Belanja kotak souvenir Setda	Rp 16.665.000,00	Rp 15.013.513,51	Rp 225.202,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.875.000,00	Rp 7.875.000,00	Rp 118.125,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 50.625,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.875.000,00	Rp 7.875.000,00	Rp 118.125,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 50.625,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 67.500,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 54.000,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 33.750,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 45.000,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 45.000,00
30 Mei 2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 67.500,00
30 Mei 2022	Belanja Pembelian Cinderamata Bunga Papan Bupati	Rp 7.200.000,00	Rp 6.486.486,49	Rp 97.297,00
30 Mei 2022	Belanja Pembelian Cinderamata Bunga Papan Wakil Bupati	Rp 4.050.000,00	Rp 3.648.648,65	Rp 54.729,00

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPH Pasal 22 yang dipungut (Tarif 1,5%)
30 Mei 2022	Belanja Pembelian Cenderamata Bunga Papan Sekda	Rp 3.600.000,00	Rp 3.243.243,24	Rp 48.648,00
30 Mei 2022	Belanja modal 2 (dua) buah meja troli makanan Setda	Rp 6.600.000,00	Rp 5.945.945,95	Rp 89.189,00
31 Mei 2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp 4.400.000,00	Rp 3.963.963,96	Rp 59.459,00
	JUMLAH			Rp 5.358.758,00

Lampiran 9 : Penyetoran PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022

Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Maret 2022 Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
01 Maret 2022	01 Maret 2022	Rp 264.545,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 147.000,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 33.750,00
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 31.500,00
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 133.636,00
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 102.272,00
10 Maret 2022	10 Maret 2022	Rp 33.750,00
11 Maret 2022	11 Maret 2022	Rp 49.773,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 68.182,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 34.090,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 81.818,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 129.545,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 129.545,00
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 34.090,00
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 67.500,00
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 45.000,00
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 90.000,00
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 33.750,00
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 418.282,00
16 Maret 2022	16 Maret 2022	Rp 205.909,00
16 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 13.110,00
16 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 19.905,00
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 60.000,00
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 40.500,00
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 67.500,00
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 184.500,00
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 14.068,00
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 9.509,00
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 60.750,00
22 Maret 2022	22 Maret 2022	Rp 39.375,00
22 Maret 2022	22 Maret 2022	Rp 78.750,00

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 102.272,00
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 259.091,00
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 95.910,00
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 67.837,00
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 1.754,00
24 Maret 2022	25 Maret 2022	Rp 3.600,00
24 Maret 2022	25 Maret 2022	Rp 4.500,00
25 Maret 2022	28 Maret 2022	Rp 24.675,00
28 Maret 2022	28 Maret 2022	Rp 38.955,00
28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp 19.261,00
28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp 17.045,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 135.000,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 85.909,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 42.954,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 110.219,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 67.500,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 50.625,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 67.500,00
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 455.645,00

Tabel Daftar Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Maret 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
01 Maret 2022	01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
02 Maret 2022	02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tepat Waktu
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tepat Waktu
04 Maret 2022	04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tepat Waktu
10 Maret 2022	10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
11 Maret 2022	11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 68.182,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 81.818,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tepat Waktu
14 Maret 2022	14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tepat Waktu
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 45.000,00	Tepat Waktu
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 90.000,00	Tepat Waktu
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
15 Maret 2022	15 Maret 2022	Rp 418.282,00	Tepat Waktu
16 Maret 2022	16 Maret 2022	Rp 205.909,00	Tepat Waktu
16 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 13.110,00	Tepat Waktu
16 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 19.905,00	Tepat Waktu
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 60.000,00	Tepat Waktu
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 40.500,00	Tepat Waktu
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
17 Maret 2022	17 Maret 2022	Rp 184.500,00	Tepat Waktu
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 14.068,00	Tepat Waktu
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 9.509,00	Tepat Waktu
21 Maret 2022	21 Maret 2022	Rp 60.750,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	22 Maret 2022	Rp 39.375,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	22 Maret 2022	Rp 78.750,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 259.091,00	Tepat Waktu

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 95.910,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 67.837,00	Tepat Waktu
22 Maret 2022	23 Maret 2022	Rp 1.754,00	Tepat Waktu
24 Maret 2022	25 Maret 2022	Rp 3.600,00	Tepat Waktu
24 Maret 2022	25 Maret 2022	Rp 4.500,00	Tepat Waktu
25 Maret 2022	28 Maret 2022	Rp 24.675,00	Tepat Waktu
28 Maret 2022	28 Maret 2022	Rp 38.955,00	Tepat Waktu
28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp 19.261,00	Tepat Waktu
28 Maret 2022	29 Maret 2022	Rp 17.045,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 135.000,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 85.909,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 42.954,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 110.219,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 50.625,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
31 Maret 2022	31 Maret 2022	Rp 455.645,00	Tepat Waktu

Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan April 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
01 April 2022	01 April 2022	Rp 90.000,00
01 April 2022	01 April 2022	Rp 45.000,00
06 April 2022	06 April 2022	Rp 308.250,00
06 April 2022	06 April 2022	Rp 33.784,00
06 April 2022	06 April 2022	Rp 40.540,00
06 April 2022	06 April 2022	Rp 33.783,00
06 April 2022	06 April 2022	Rp 67.567,00
06 April 2022	07 April 2022	Rp 54.054,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 51.351,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 101.250,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 69.750,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 47.297,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 72.972,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 67.567,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 75.675,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 101.351,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 128.378,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 58.990,00
11 April 2022	11 April 2022	Rp 26.897,00
11 April 2022	12 April 2022	Rp 22.677,00
11 April 2022	12 April 2022	Rp 14.209,00
12 April 2022	12 April 2022	Rp 120.750,00
12 April 2022	12 April 2022	Rp 225.000,00
12 April 2022	12 April 2022	Rp 56.250,00
13 April 2022	13 April 2022	Rp 182.094,00
18 April 2022	18 April 2022	Rp 24.324,00
18 April 2022	19 April 2022	Rp 152.297,00

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
19 April 2022	19 April 2022	Rp 50.625,00
19 April 2022	19 April 2022	Rp 91.891,00
19 April 2022	19 April 2022	Rp 228.547,00
19 April 2022	19 April 2022	Rp 77.027,00
19 April 2022	20 April 2022	Rp 57.375,00
19 April 2022	20 April 2022	Rp 67.500,00
20 April 2022	20 April 2022	Rp 33.750,00
21 April 2022	21 April 2022	Rp 45.750,00
22 April 2022	22 April 2022	Rp 30.375,00
22 April 2022	22 April 2022	Rp 100.199,00
22 April 2022	22 April 2022	Rp 242.100,00
26 April 2022	26 April 2022	Rp 656.756,00
26 April 2022	26 April 2022	Rp 118.125,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 128.378,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 128.378,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 42.567,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 36.486,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 30.405,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 43.875,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 51.750,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 103.500,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 573.624,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 55.042,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 270.273,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 74.324,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 59.459,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 29.729,00
27 April 2022	27 April 2022	Rp 52.027,00
27 April 2022	28 April 2022	Rp 50.625,00
27 April 2022	28 April 2022	Rp 101.250,00

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPH Pasal 22
27 April 2022	28 April 2022	Rp 54.000,00
27 April 2022	28 April 2022	Rp 99.000,00

Tabel Daftar Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan April 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
01 April 2022	01 April 2022	Rp 90.000,00	Tepat Waktu
01 April 2022	01 April 2022	Rp 45.000,00	Tepat Waktu
06 April 2022	06 April 2022	Rp 308.250,00	Tepat Waktu
06 April 2022	06 April 2022	Rp 33.784,00	Tepat Waktu
06 April 2022	06 April 2022	Rp 40.540,00	Tepat Waktu
06 April 2022	06 April 2022	Rp 33.783,00	Tepat Waktu
06 April 2022	06 April 2022	Rp 67.567,00	Tepat Waktu
06 April 2022	07 April 2022	Rp 54.054,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 51.351,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 101.250,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 69.750,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
07 April 2022	07 April 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 47.297,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 72.972,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 67.567,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 75.675,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 101.351,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 128.378,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 58.990,00	Tepat Waktu
11 April 2022	11 April 2022	Rp 26.897,00	Tepat Waktu
11 April 2022	12 April 2022	Rp 22.677,00	Tepat Waktu
11 April 2022	12 April 2022	Rp 14.209,00	Tepat Waktu
12 April 2022	12 April 2022	Rp 120.750,00	Tepat Waktu
12 April 2022	12 April 2022	Rp 225.000,00	Tepat Waktu
12 April 2022	12 April 2022	Rp 56.250,00	Tepat Waktu
13 April 2022	13 April 2022	Rp 182.094,00	Tepat Waktu
18 April 2022	18 April 2022	Rp 24.324,00	Tepat Waktu
18 April 2022	19 April 2022	Rp 152.297,00	Tepat Waktu
19 April 2022	19 April 2022	Rp 50.625,00	Tepat Waktu
19 April 2022	19 April 2022	Rp 91.891,00	Tepat Waktu

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
19 April 2022	19 April 2022	Rp 228.547,00	Tepat Waktu
19 April 2022	19 April 2022	Rp 77.027,00	Tepat Waktu
19 April 2022	20 April 2022	Rp 57.375,00	Tepat Waktu
19 April 2022	20 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
20 April 2022	20 April 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
21 April 2022	21 April 2022	Rp 45.750,00	Tepat Waktu
22 April 2022	22 April 2022	Rp 30.375,00	Tepat Waktu
22 April 2022	22 April 2022	Rp 100.199,00	Tepat Waktu
22 April 2022	22 April 2022	Rp 242.100,00	Tepat Waktu
26 April 2022	26 April 2022	Rp 656.756,00	Tepat Waktu
26 April 2022	26 April 2022	Rp 118.125,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 128.378,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 128.378,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 42.567,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 36.486,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 30.405,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 43.875,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 51.750,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 103.500,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 573.624,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
26 April 2022	27 April 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 55.042,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 270.273,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 74.324,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 59.459,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 29.729,00	Tepat Waktu
27 April 2022	27 April 2022	Rp 52.027,00	Tepat Waktu
27 April 2022	28 April 2022	Rp 50.625,00	Tepat Waktu
27 April 2022	28 April 2022	Rp 101.250,00	Tepat Waktu
27 April 2022	28 April 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
27 April 2022	28 April 2022	Rp 99.000,00	Tepat Waktu

Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Mei 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22
10 Mei 2022	10 Mei 2022	Rp 27.783,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 30.375,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 121.500,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 67.568,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 33.783,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 81.081,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 33.783,00
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 101.351,00
17 Mei 2022	17 Mei 2022	Rp 54.825,00
17 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 50.250,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 212.162,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 210.600,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 226.800,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 224.100,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 112.050,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 111.375,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 54.000,00
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 111.375,00
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 74.121,00
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 22.351,00
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 84.729,00
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 67.500,00
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 94.594,00
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 90.000,00
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 45.000,00
20 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 37.902,00

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPH Pasal 22
23 Mei 2022	23 Mei 2022	Rp 91.216,00
23 Mei 2022	23 Mei 2022	Rp 256.756,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 101.351,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 34.054,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 9.000,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 100.199,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 177.027,00
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 110.270,00
24 Mei 2022	25 Mei 2022	Rp 25.027,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 41.594,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 11.090,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 67.500,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 33.750,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 36.000,00
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 67.567,00
27 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 225.202,00
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 118.125,00
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 50.625,00
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 118.125,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 50.625,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 33.750,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 67.500,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 54.000,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 33.750,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 45.000,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 45.000,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 67.500,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 97.297,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 54.729,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 48.648,00
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 89.189,00
31 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 59.459,00

Tabel Daftar Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Mei 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
10 Mei 2022	10 Mei 2022	Rp 27.783,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 30.375,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 121.500,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 67.568,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 81.081,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tepat Waktu
10 Mei 2022	11 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tepat Waktu
17 Mei 2022	17 Mei 2022	Rp 54.825,00	Tepat Waktu
17 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 50.250,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 212.162,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	18 Mei 2022	Rp 210.600,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 226.800,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 224.100,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 112.050,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
18 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 74.121,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 22.351,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	19 Mei 2022	Rp 84.729,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 94.594,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 90.000,00	Tepat Waktu
19 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tepat Waktu
20 Mei 2022	20 Mei 2022	Rp 37.902,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	23 Mei 2022	Rp 91.216,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	23 Mei 2022	Rp 256.756,00	Tepat Waktu

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran PPh Pasal 22	Keterangan
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 34.054,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 9.000,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 100.199,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 177.027,00	Tepat Waktu
23 Mei 2022	24 Mei 2022	Rp 110.270,00	Tepat Waktu
24 Mei 2022	25 Mei 2022	Rp 25.027,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 41.594,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 11.090,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 36.000,00	Tepat Waktu
25 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 67.567,00	Tepat Waktu
27 Mei 2022	27 Mei 2022	Rp 225.202,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 97.297,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 54.729,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 48.648,00	Tepat Waktu
30 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 89.189,00	Tepat Waktu
31 Mei 2022	31 Mei 2022	Rp 59.459,00	Tepat Waktu

Lampiran 10 : Pelaporan PPh Pasal 22 bulan Maret-April 2022

Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Maret 2022 Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tidak Dilaporkan
04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tidak Dilaporkan
04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan
10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 68.182,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 81.818,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tidak Dilaporkan
14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tidak Dilaporkan
15 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
15 Maret 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan
15 Maret 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan
15 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
15 Maret 2022	Rp 418.282,00	Tidak Dilaporkan
16 Maret 2022	Rp 205.909,00	Tidak Dilaporkan
16 Maret 2022	Rp 13.110,00	Tidak Dilaporkan
16 Maret 2022	Rp 19.905,00	Tidak Dilaporkan
17 Maret 2022	Rp 60.000,00	Tidak Dilaporkan
17 Maret 2022	Rp 40.500,00	Tidak Dilaporkan
17 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
17 Maret 2022	Rp 184.500,00	Tidak Dilaporkan
21 Maret 2022	Rp 14.068,00	Tidak Dilaporkan
21 Maret 2022	Rp 9.509,00	Tidak Dilaporkan
21 Maret 2022	Rp 60.750,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 39.375,00	Tidak Dilaporkan

Masa Pajak (Tanggal)	PPH Pasal 22	Pelaporan SPT
22 Maret 2022	Rp 78.750,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 259.091,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 95.910,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 67.837,00	Tidak Dilaporkan
22 Maret 2022	Rp 1.754,00	Tidak Dilaporkan
24 Maret 2022	Rp 3.600,00	Tidak Dilaporkan
24 Maret 2022	Rp 4.500,00	Tidak Dilaporkan
25 Maret 2022	Rp 24.675,00	Tidak Dilaporkan
28 Maret 2022	Rp 38.955,00	Tidak Dilaporkan
28 Maret 2022	Rp 19.261,00	Tidak Dilaporkan
28 Maret 2022	Rp 17.045,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 135.000,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 85.909,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 42.954,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 110.219,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
31 Maret 2022	Rp 455.645,00	Tidak Dilaporkan

Tabel Daftar Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Maret 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Keterangan
01 Maret 2022	Rp 264.545,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 147.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
02 Maret 2022	Rp 31.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
04 Maret 2022	Rp 133.636,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
04 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 Maret 2022	Rp 49.773,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 68.182,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 81.818,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 129.545,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
14 Maret 2022	Rp 34.090,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
15 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
15 Maret 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
15 Maret 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
15 Maret 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
15 Maret 2022	Rp 418.282,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
16 Maret 2022	Rp 205.909,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
16 Maret 2022	Rp 13.110,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
16 Maret 2022	Rp 19.905,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Maret 2022	Rp 60.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Maret 2022	Rp 40.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Maret 2022	Rp 184.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
21 Maret 2022	Rp 14.068,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
21 Maret 2022	Rp 9.509,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
21 Maret 2022	Rp 60.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 39.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 78.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 102.272,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 259.091,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Masa Pajak (Tanggal)	PPH Pasal 22	Pelaporan SPT	Keterangan
22 Maret 2022	Rp 95.910,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 67.837,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 Maret 2022	Rp 1.754,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
24 Maret 2022	Rp 3.600,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
24 Maret 2022	Rp 4.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Maret 2022	Rp 24.675,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
28 Maret 2022	Rp 38.955,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
28 Maret 2022	Rp 19.261,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
28 Maret 2022	Rp 17.045,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 135.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 85.909,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 42.954,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 110.219,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Maret 2022	Rp 455.645,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan April 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
01 April 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan
01 April 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 308.250,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 33.784,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 40.540,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan
06 April 2022	Rp 54.054,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 51.351,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 101.250,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 69.750,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 47.297,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 72.972,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 75.675,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 58.990,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 26.897,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 22.677,00	Tidak Dilaporkan
11 April 2022	Rp 14.209,00	Tidak Dilaporkan
12 April 2022	Rp 120.750,00	Tidak Dilaporkan
12 April 2022	Rp 225.000,00	Tidak Dilaporkan
12 April 2022	Rp 56.250,00	Tidak Dilaporkan
13 April 2022	Rp 182.094,00	Tidak Dilaporkan
18 April 2022	Rp 24.324,00	Tidak Dilaporkan

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
18 April 2022	Rp 152.297,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 91.891,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 228.547,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 77.027,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 57.375,00	Tidak Dilaporkan
19 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
20 April 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
21 April 2022	Rp 45.750,00	Tidak Dilaporkan
22 April 2022	Rp 30.375,00	Tidak Dilaporkan
22 April 2022	Rp 100.199,00	Tidak Dilaporkan
22 April 2022	Rp 242.100,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 656.756,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 42.567,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 36.486,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 30.405,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 43.875,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 51.750,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 103.500,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 573.624,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 55.042,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 270.273,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 74.324,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 59.459,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 29.729,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 52.027,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 101.250,00	Tidak Dilaporkan

Masa Pajak (Tanggal)	PPH Pasal 22	Pelaporan SPT
27 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
27 April 2022	Rp 99.000,00	Tidak Dilaporkan

Tabel Daftar Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan April 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Sesuai/ Tidak Sesuai
01 April 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
01 April 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 308.250,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 33.784,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 40.540,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
06 April 2022	Rp 54.054,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 51.351,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 101.250,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 69.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
07 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 47.297,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 72.972,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 75.675,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 58.990,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 26.897,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 22.677,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
11 April 2022	Rp 14.209,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
12 April 2022	Rp 120.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
12 April 2022	Rp 225.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
12 April 2022	Rp 56.250,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
13 April 2022	Rp 182.094,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 April 2022	Rp 24.324,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 April 2022	Rp 152.297,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 91.891,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Sesuai/ Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 228.547,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 77.027,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 57.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
20 April 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
21 April 2022	Rp 45.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 April 2022	Rp 30.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 April 2022	Rp 100.199,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
22 April 2022	Rp 242.100,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 656.756,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 128.378,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 42.567,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 36.486,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 30.405,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 43.875,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 51.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 103.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 573.624,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
26 April 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 55.042,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 270.273,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 74.324,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 59.459,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 29.729,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 52.027,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 101.250,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 April 2022	Rp 99.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Daftar Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Mei 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
10 Mei 2022	Rp 27.783,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 30.375,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 121.500,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 67.568,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 81.081,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan
10 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan
17 Mei 2022	Rp 54.825,00	Tidak Dilaporkan
17 Mei 2022	Rp 50.250,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 212.162,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 210.600,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 226.800,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 224.100,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 112.050,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 74.121,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 22.351,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 84.729,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 94.594,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan
19 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT
20 Mei 2022	Rp 37.902,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 91.216,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 256.756,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 34.054,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 9.000,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 100.199,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 177.027,00	Tidak Dilaporkan
23 Mei 2022	Rp 110.270,00	Tidak Dilaporkan
24 Mei 2022	Rp 25.027,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 41.594,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 11.090,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 36.000,00	Tidak Dilaporkan
25 Mei 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan
27 Mei 2022	Rp 225.202,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 97.297,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 54.729,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 48.648,00	Tidak Dilaporkan
30 Mei 2022	Rp 89.189,00	Tidak Dilaporkan
31 Mei 2022	Rp 59.459,00	Tidak Dilaporkan

Tabel Daftar Kesesuaian Pelaporan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Bulan Mei 2022 Sekretariat

Daerah Kabupaten Sleman

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Sesuai/ Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 27.783,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 30.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 121.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 67.568,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 81.081,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 33.783,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
10 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Mei 2022	Rp 54.825,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
17 Mei 2022	Rp 50.250,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 212.162,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 210.600,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 226.800,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 224.100,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 112.050,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
18 Mei 2022	Rp 111.375,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 74.121,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 22.351,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 84.729,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 94.594,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 90.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
19 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
20 Mei 2022	Rp 37.902,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 91.216,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 256.756,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 101.351,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai

Masa Pajak (Tanggal)	PPh Pasal 22	Pelaporan SPT	Sesuai/ Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 34.054,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 9.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 100.199,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 177.027,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
23 Mei 2022	Rp 110.270,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
24 Mei 2022	Rp 25.027,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 41.594,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 11.090,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 36.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
25 Mei 2022	Rp 67.567,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
27 Mei 2022	Rp 225.202,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 118.125,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 50.625,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 54.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 33.750,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 45.000,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 67.500,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 97.297,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 54.729,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 48.648,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
30 Mei 2022	Rp 89.189,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai
31 Mei 2022	Rp 59.459,00	Tidak Dilaporkan	Tidak Sesuai